

PEMETAAN PARTISIPATIF KAMPUNG PESISIR KELURAHAN TALLO KOTA MAKASSAR

Amiruddin Akbar Fisul¹ dan Liza Utami Marzaman²

¹ Email: amiruddinakbarfisul07@gmail.com
Universitas Andi Djemma

² Email: icamarz@gmail.com
Revitalising Informal Settlement and their Environment (RISE)

Abstrak. Warga kampung pesisir di Kelurahan Tallo memiliki masalah dalam bidang sanitasi dan membutuhkan bimbingan dalam pengelolaan prasarana sanitasi tersebut. Tingkat partisipasi warga boleh dikatakan masih sangat kurang. Hal ini disebabkan karena peran partisipasi tersebut telah diambil alih oleh stakeholder-stakeholder kampung, sehingga warga menjadi terbiasa untuk hanya menjadi penonton dari program-program yang masuk ke kampungnya. Kurangnya partisipasi warga, serta kurangnya pendampingan masyarakat yang memadai menjadikan warga cenderung apatis, sehingga sulit untuk mengimplementasikan program-program pembangunan masyarakat jangka panjang, dimana keikutsertaan dan semangat gotong-royong masyarakat lah yang menjadi modal utamanya. Melalui kegiatan pemetaan partisipatif ini, kami ingin mencoba menggugah kembali kesadaran warga tentang pentingnya kegotong-royongan dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan bermasyarakat. Dari dua kegiatan yang kami telah lakukan yaitu pemetaan partisipatif dan pengorganisasian warga, kami mengharapkan beberapa target luaran yang akan dicapai yang terbagi atas luaran yang bersifat fisik, dan non-fisik.

Kata Kunci: Permukiman pesisir, pemetaan partisipatif.

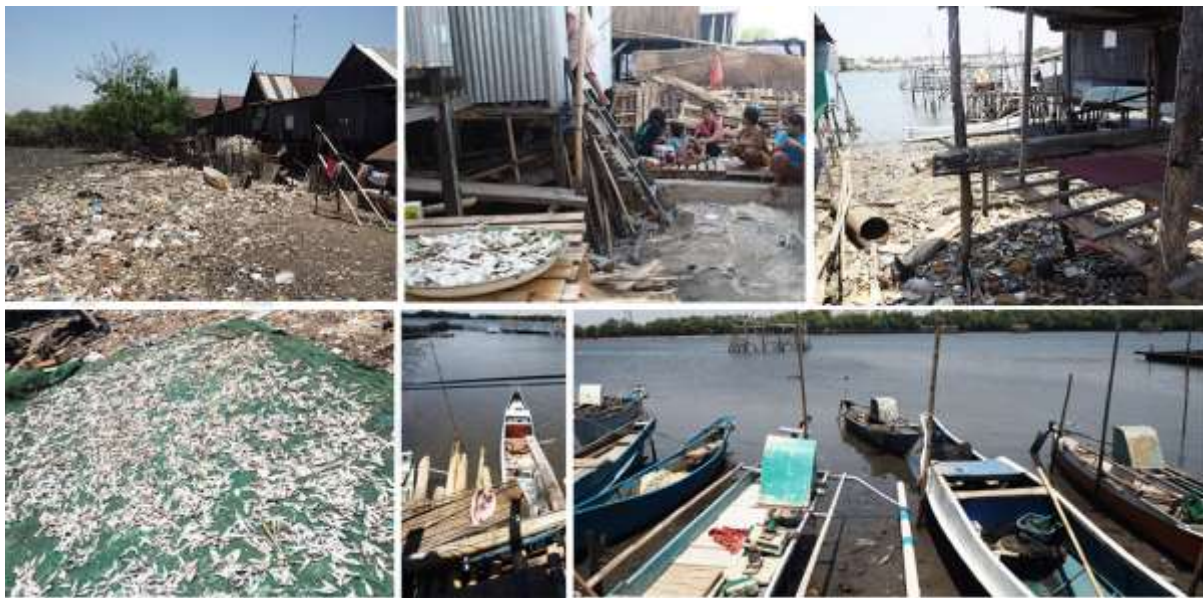
PENDAHULUAN

Sebagai salah satu kota pesisir, Kota Makassar memiliki banyak permukiman pada wilayah pesisirnya, salah satunya adalah permukiman pesisir di Kelurahan Tallo. Karakteristik permukiman ini sama seperti permukiman pesisir di perkotaan pada umumnya, antara lain memiliki tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dipengaruhi oleh wilayah perairan, dan cenderung kumuh. Pada permukiman pesisir yang padat, pembuatan atau penambahan bangunan baru untuk pertumbuhan permukiman secara fisik idealnya tidak dilakukan lagi karena tingkat kepadatan yang sudah sangat tinggi dan keterbatasan lahan (Fisul AA, 2016).

Sebagai salah satu kampung pesisir yang berada dekat dengan pusat kota, perkampungan pesisir yang terletak pada wilayah Sungai Tallo di RW 04 RT B, C, dan D Kelurahan Tallo ini telah beberapa kali menerima bantuan program pemerintah yang bersifat pembangunan infrastruktur utama seperti jalan, air bersih, dan MKC umum. Namun, kesadaran warga untuk merawat fasilitas-fasilitas tersebut belum memadai.

Belum lagi, warga masih membutuhkan bantuan dalam bidang sanitasi dan bimbingan dalam pengelolaan prasarana sanitasi tersebut. Tingkat partisipasi warga boleh dikatakan masih sangat kurang. Hal ini disebabkan karena peran partisipasi tersebut telah diambil alih oleh *stakeholder-stakeholder* kampung, sehingga warga menjadi terbiasa untuk hanya menjadi

penonton dari program-program yang masuk ke kampungnya. Kurangnya partisipasi warga, serta kurangnya pendampingan masyarakat yang memadai menjadikan warga cenderung apatis, sehingga sulit untuk mengimplementasikan program-program pembangunan masyarakat jangka panjang, dimana keikutsertaan dan semangat gotong-royong masyarakat lah yang menjadi modal utamanya. Mata pencaharian utama di perkampungan ini adalah sebagai nelayan dengan penghasilan yang tidak menentu. Untuk membantu perekonomian keluarga, kadang ada warga yang merangkap bekerja sebagai tukang ojek dan atau buruh bangunan. Sementara itu, ibu-ibu rumah tangga nya ada yang berjualan di area depan rumah dan ada pula yang berjualan ikan.



Gambar 1: Kondisi permukiman pesisir RW 4, RT B, C, dan D Kel. Tallo

Berangkat dari permasalahan mendasar yang telah disebutkan sebelumnya, kami yakin bahwa dari banyak program berbasis masyarakat yang kurang berhasil, sedikit banyak dipengaruhi oleh faktor kurangnya kesadaran warga masyarakat akan permasalahan bersama yang mereka miliki. Hal tersebut menjadikan mereka cenderung apatis dan egois, sehingga berujung pada kurangnya partisipasi aktif seluruh warga, lemahnya kohesi sosial, serta memudarnya semangat gotong-royong yang merupakan modal modal utama untuk bangkit dan berbenah.

Melalui kegiatan pemetaan partisipatif ini, kami ingin mencoba menggugah kembali kesadaran warga tentang pentingnya kegotong-royongan dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan bermasyarakat. Dari dua kegiatan yang kami telah lakukan yaitu pemetaan partisipatif dan pengorganisasian warga, kami mengharapkan beberapa target luaran yang akan dicapai yang terbagi atas luaran yang bersifat fisik, dan non-fisik.

METODE

Metode yang digunakan pada kegiatan ini yaitu menggunakan pendekatan partisipatif dengan melibatkan seluruh masyarakat dalam proses pemetaan dan pemecahan masalah. Dalam kegiatan ini kami meyakini, bahwa pemahaman warga akan masalah dan potensi yang

mereka miliki amat penting, sehingga masyarakatlah yang seharusnya diberikan kepercayaan dalam menyelesaikan masalah dan memanfaatkan potensi yang ada mulai dari pengidentifikasian masalah; menilai dan memformulasikan permasalahannya, baik fisik, sosial, ekonomi, maupun budaya dan kesehatan lingkungan, sampai pada pembangunan visi dan aspirasi, dan kemudian memprioritaskan, mengintervensi, merencana, mengelola, memonitor, dan bahkan dalam hal pemilihan teknologi yang mereka anggap paling tepat untuk diterapkan. Pentingnya metode partisipatif secara berkelanjutan agar dapat berbagi informasi untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memperbaiki kehidupannya (Asnuddin, 2010). Kegiatan ini dilakukan secara bersama-sama oleh warga dan berbagai LSM seperti Arkom Makassar, KPRM, LAW, Decatu dan lain-lain.

PEMBAHASAN

Dari dua kegiatan yang kami akan kami lakukan yaitu pemetaan partisipatif dan pengorganisasian warga, kami mengharapkan beberapa target luaran yang akan dicapai yang terbagi atas luaran yang bersifat fisik, dan non-fisik. Adapun target luaran yang bersifat fisik yaitu:

- a. Peta kampung; yaitu peta wilayah kampung yang mencakup beberapa lapisan/*layer* pembentuk struktur fisik dan non-fisik kampung: peta titik lokasi elemen fisik kampung (rumah warga, sarana infrastruktur, dsb), peta potensi dan masalah fisik kampung (jembatan rusak, rumah tidak layak huni, jalanan rusak/tergenang, lokasi kebun/tambak komunal, dsb), peta keadaan sosial, ekonomi, budaya (letak titik kegiatan ekonomi, ketersediaan/ketidak-tersediaan balai warga, sarana ibadah, tingkat pendidikan warga, jenis pekerjaan & pendapatan, penyakit, dsb. disertai dengan penjelasan tentang permasalahan dan potensi yang dimiliki), peta harapan warga akan penyelesaian permasalahan dan pemanfaatan potensi yang muncul pada peta.
- b. Data. Data dan informasi yang diperoleh dari proses pemetaan merupakan elemen yang sangat penting untuk bertolak dan melakukan kalibrasi data melalui tabel, skema, dan diagram, agar informasi yang telah dikumpulkan dari proses pemetaan dapat menjangkau orang banyak sehingga sumber daya yang dibutuhkan untuk aksi selanjutnya dapat dilakukan. Misalnya, ketika ingin membangun sarana infrastruktur, data yang dimiliki dapat diajukan kepada pemerintah sehingga terjadi kerjasama antara warga dan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur tersebut. Atau ketika ingin mendatangkan penyuluh, warga dapat bergerak mengajak pihak terkait untuk bekerja berjejaring demi kemajuan kampungnya. Untuk itu, luaran dari pengolahan data ini akan kami publikasikan dalam bentuk dokumentasi foto/video serta infografis data kampung ke media daring seperti *Facebook Fanpage* agar terjalin jejaring semangat dengan kegiatan serupa baik di dalam maupun di luar negeri. Dengan data ini pula, dapat membantu masyarakat untuk berdiskusi dan menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Pembangunan partisipatif memberikan ruang bagi masyarakat untuk beraspirasi, berdialog, dan bermusyawarah dengan pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan. Hal ini merupakan bentuk komunikasi dalam pembangunan (Sulaiman, Sugito dan Sabiq, 2016).

Melalui proses fasilitasi yang menyenangkan dan inklusif, serta pelibatan warga sebagai subjek/aktor utama dari kegiatan ini, kami mengharapkan target luaran yang bersifat non-fisik yang dapat menginspirasi warga untuk terus bergerak, bergotong royong, dan mampu mandiri di kemudian hari. Target-target non-fisik tersebut antara lain:

- a. Warga mampu melihat langsung permasalahan dan potensi yang dimilikinya bersama-sama. Pengetahuan itu tidak lagi menjadi milik ketua RT, ketua kampung, atau pemerintah semata, namun, warga juga kembali menjadi pemilik dari masalah dan potensi tersebut. Dengan terlibat langsung dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi melalui pemetaan yang inklusif dan partisipatif, akhirnya warga menjadi paham dan muncul keinginan untuk bangkit bersama-sama.
- b. Melalui diskusi kelompok, warga diajak untuk menentukan titik prioritas masalah dan meramu berbagai solusi penyelesaian masalah. Dari situ akan terdapat rencana kerja/rencana tindak lanjut dari hasil pemetaan partisipatif.
- c. Dengan adanya semangat kerja dari warga, maka penguatan organisasi/ kelompok warga pun dapat diinisiasi. Organisasi yang terstruktur; terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara, serta anggota akan menjadi roda yang menggerakkan kampung untuk mencapai tujuan bersama secara mandiri dan berkelanjutan.

Warga yang bersatu padu akan menjadi lebih kuat untuk mencapai visi dan misi kampung/daerahnya. Untuk memerdekakan warga dari ketergantungan ‘bantuan’ berupa uang, maka akan dibentuk kelompok tabungan warga dengan nominal yang dapat dijangkau serta telah disepakati oleh seluruh elemen warga. Dana tersebut dapat digunakan untuk membiayai perbaikan-perbaikan kecil di kampung ataupun untuk membantu warga lain yang sedang ditimpa musibah.

1. Persiapan sosial

Dimulai dengan pengenalan diri, menggugah kesadaran, menumbuhkan kepercayaan, mengajak bekerja sama, memotivasi seluruh warga dan tokoh-tokoh, dengan cara berkunjung langsung, dan curah pendapat. Fasilitator sedapat mungkin menjadi pendengar yang baik terhadap setiap curah pendapat warga.



Gambar 2: Pertemuan perdana dengan warga

2. Pemetaan Partisipatif

Merupakan salah satu teknik yang digunakan pada tahap pengumpulan informasi dari warga/*assesment*. Informasi tersebut dapat berupa masalah, kebutuhan, dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Kegiatan pemetaan menggunakan instrumen yang interaktif dan

menarik sehingga warga dapat memvisualisasikan letak masalah/ kebutuhan/ potensinya dengan lebih baik. Selain itu seluruh warga dapat memahami kedudukan masalah dan kausalitasnya serta dapat bersama-sama menarik titik prioritas dari permasalahan yang ingin segera diselesaikan, bersama dengan solusi-solusi yang mereka tawarkan dan sepakati bersama. Pada tahapan ini, warga dapat dibagi-bagi dalam beberapa kelompok (*Focus Group Discussion*) sesuai dengan jenis peta yang akan mereka buat. Setelah terjadi diskusi di kelompok-kelompok kecil, barulah warga digabungkan kembali menjadi satu kelompok besar dan mempresentasikan peta dan hasil temuan dari kelompok masing-masing. Proposal ini menggarisbawahi kegiatan Pemetaan Partisipatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran warga akan hubungan timbal balik dan interaksi mereka dengan ruang yang mereka tinggali. Peta tidak hanya berfungsi sebagai salah satu produk akhir, tetapi juga merupakan bagian dari proses demokratisasi yang *bottom-up*. Melalui pemetaan oleh warga, akan timbul sikap kemandirian dan meningkatnya pemahaman warga akan hubungan antara manusia dan tempat tinggalnya. Selain itu, dengan peta kampung juga dapat diidentifikasi peletakan fasilitas umum pada kampung tersebut agar mudah untuk diakses oleh warga sekitar dengan berjalan kaki. Menurut Fisru (2016), radius 400 meter merupakan jarak yang masih tergolong nyaman untuk berjalan kaki.



Gambar 3: Proses pemetaan partisipatif

Peta yang dibuat oleh warga peta yang informatif dan merupakan hasil pemetaan warga bersama. Pada peta tersebut, terdapat informasi baik secara fisik seperti ketersediaan fasilitas sanitasi/ MCK, ketersediaan air bersih, listrik, dan lain-lain. Selain itu juga, pada peta tersebut terdapat informasi sosial seperti kepemilikan lahan, jumlah anak usia sekolah, status sosial, dan lain-lain. Setelah itu, peta tersebut didigitasi dengan memeriksa kembali akurasi bangunan secara fisik.



Gambar 4. Peta warga yang telah didigitasi

3. Perencanaan program

Perencanaan partisipatif berawal dari keyakinan bahwa keberhasilan program-program pembangunan ditentukan oleh komitmen semua *stakeholders* dan komitmen ini didapat sejauh mana mereka terlibat dalam proses perencanaan program tersebut (Sari, 2016). Mencakup pembuatan rencana kerja/ rencana tindak lanjut yang dipertanggungjawabkan langsung oleh warga. Perencanaan program ini mencakup diskusi tentang penyelesaian masalah prioritas yang ditemukan dan disepakati untuk diselesaikan bersama secara gotong-royong. Misalnya, program pembangunan/perbaikan infrastruktur yang telah disepakati, mulai dari penentuan nama program, tujuan, sasaran, program waktu, tempat, sumber dan potensi serta kepanitiannya, sampai pembuatan rencana anggaran biaya (RAB). Kegiatan ini membutuhkan pendampingan dari segi fasilitasi, moderator, dan supervisi.

4. Penguatan organisasi/paguyuban warga

Diketahui langsung oleh warga setempat, bersama-sama dengan berbagai LSM seperti Arsitek Komunitas Makassar, LAW, KPRM, dan lain-lain bertindak sebagai fasilitator dan penasehat/ konsultan terhadap organisasi/paguyuban warga tersebut. Selanjutnya, warga dapat membentuk kelompok-kelompok yang lebih kecil, seperti kelompok tabungan untuk ibu-ibu, kelompok kerja untuk bapak-bapak, dan kelompok-kelompok wirausaha.

Kedepannya, kegiatan ini akan berfokus pada kaderisasi warga sebagai *Community Organizer* di tingkatan warga, agar mereka memiliki kemampuan untuk memfasilitasi dan memberi contoh kepada sesama warga di tempat lainnya. Selain itu, warga akan diberi pelatihan agar dapat bekerja berjejaring dengan pihak-pihak luar yang dapat mendukung program-program yang mereka buat di kemudian hari.



Gambar 5: Penyusunan program dan penguatan organisasi warga

SIMPULAN

Dengan melakukan pemetaan menggunakan pendekatan partisipatif yang melibatkan seluruh masyarakat dalam proses pemetaan dan pemecahan masalah, akan menumbuhkan pemahaman dan kesadaran warga akan masalah dan potensi yang mereka miliki, sehingga masyarakatlah yang seharusnya diberikan kepercayaan dalam menyelesaikan masalah dan memanfaatkan potensi yang ada mulai dari pengidentifikasian masalah; menilai dan memformulasikan permasalahannya, baik fisik, sosial, ekonomi, maupun budaya dan kesehatan lingkungan, sampai pada pembangunan visi dan aspirasi, dan kemudian memprioritaskan, mengintervensi, merencana, mengelola, memonitor, dan bahkan dalam hal pemilihan teknologi yang mereka anggap paling tepat untuk diterapkan. Dengan memahami masalah serta potensi yang ada, warga dapat merencanakan sendiri program apa yang akan dan bisa dilaksanakan baik itu program jangka pendek maupun jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnuddin Andi (2010). Pendekatan Partisipatif dalam Pembangunan Proyek Infrastruktur Perdesaan di Indonesia. *Jurnal Smartek Vol.8 No.3 2010 (182 – 190)*
- Fisu AA (2016). Analisis dan Konsep Perencanaan Kawasan Pelabuhan Kota Penajam Sebagai Pintu Gerbang Kab. Penajam Paser Utara Kalimantan Timur. *Jurnal Pena Teknik Vol.1 No.2 2016 (125 – 136)*
- Fisu AA. (2016). Potensi Demand Pengembangan Kanal Jongaya & Panampu Sebagai Moda Transportasi (*Waterway*) di Kota Makassar. *Jurnal Manajemen Transportasi dan Logistik Vol.3 No.3 2016 (285-298)*
- Sari Ita Puspita. (2016). Implementasi pembangunan Partisipatif Studi Kasus di Kelurahan Andowiya kabupaten Konawe Utara. *Jurnal Ekonomi Univ. Halu Oleo Vol.1 No.1 2016 (179 – 188)*
- Sukaiman, Sugito dan Sabiq (2016). Komunikasi Pembangunan Partisipatif Untuk Pemberdayaan Buruh Migran. *Jurnal Ilmu Komunikasi Vol. 13 No.2 2016 (233 – 252).*